



## **Memaknai Semangat Calvin Terhadap *Civil Society*: Dalam Upaya GBKP Memberdayakan Manusia Berbasis Keberagaman**

**Eikel Ginting**

*Universitas Kristen Duta Wacana*

[eikelginting63@gmail.com](mailto:eikelginting63@gmail.com)

### **Abstract:**

*Seeing GBKP (Batak Karo Protestant Church) as a tribal church in the role and function of a vocation in the world, it is necessary to interpret this vocation in the discourse of empowering a pluralistic society. In particular, as a church that inherits the values of John Calvin, it is necessary to revitalize these values in the context of the Karo people. Especially in social problems that exist outside the church building, even from a pluralistic general society. This paper also understands civil society as a "civil" society and is identical with standing on its own feet, then how the church is able to be present in encouraging, facilitating, and empowering the community regardless of ethnicity, religion and race identity. The call for GBKP in empowering people is something that needs to be renewed, so that GBKP praxis in a pluralistic society becomes real and not just a discourse.*

**Keywords:** *civil society; GBKP; human action; Yohanes Calvin*

### **Abstrak:**

Melihat GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) sebagai gereja suku dalam peran dan fungsi panggilan dalam dunia, perlu memaknai panggilan itu dalam wacana pemberdayaan masyarakat yang majemuk. Terkhusus, sebagai gereja yang mewarisi nilai-nilai Yohanes Calvin, perlu adanya revitalisasi nilai-nilai itu dalam konteks masyarakat Karo. Terlebih dalam permasalahan-permasalahan sosial yang ada di luar bangunan gereja, bahkan berasal dari masyarakat umum yang majemuk. Dalam tulisan ini juga memahami civil society sebagai masyarakat yang "madani" dan identik dengan berdiri di kaki sendiri, lalu bagaimana gereja itu mampu hadir dalam mendorong, memfasilitasi, dan memberdayakan masyarakat itu tanpa memandang identitas suku, agama dan ras. Panggilan GBKP dalam memberdayakan manusia menjadi hal yang perlu mengalami pembaharuan, agar praksis GBKP dalam masyarakat majemuk menjadi nyata dan bukan hanya sekedar wacana.

**Kata kunci:** masyarakat umum; GBKP; tindakan kemanusiaan; Yohanes Calvin

## **PENDAHULUAN**

Memahami identitas gereja bukan hanya menyoal dogma ataupun bentuk ritual dari gereja itu. Namun lebih daripada itu bagaimana gereja dapat menunjukkan eksistensi dalam dunia, sebagai perwujudan kasih Allah kepada setiap manusia. Dalam perjalanan mewujudkan kasih Allah itu banyak pemahaman-pemahaman jemaat sendiri, maupun doktrin gereja yang justru hanya berpusat kepada internal gereja itu sendiri dan hanya



mengutamakan kepada kepentingan umat sendiri melalui program-program. GBKP<sup>1</sup> sebagai gereja kesukuan juga menghadapi tantangan yang sama untuk menjawab pergumulan-pergumulan manusia secara universal. Relasi antara Yohanes Calvin dan GBKP merupakan relasi identitas sebagai gereja yang mengadopsi sistem, maupun pengajaran dalam struktural maupun praksis gereja. Maka dalam kaitan ini menelusuri pemahaman Calvin mengenai tantangan sosial yang dituangkannya dalam ide-ide serta tulisan –tulisan, menjadi referensi melihat tantangan yang sama pada situasi sosial sekitar abad-16 dalam situasi sosial-politik masa kini.

Nilai dan ideologi dari Calvin bukanlah menjadi acuan mutlak dalam gereja, terkhusus GBKP dalam melakukan praksis dalam pelayanan, namun menarik memperjumpakan paham Calvin dengan situasi GBKP yang hidup di tengah-tengah budaya Karo dan konteks yang lebih luas yaitu *civil society*. Dalam memahami *civil society* sebagai relasi personal dalam masyarakat yang hidup bersama dalam keadaan yang mandiri, dan mampu mengandalkan nilai kebersamaan dalam pembangunan secara swadaya.

Menjawab tantangan kemanusiaan secara spesifik melihat pembangunan yang dilakukan secara kontinuitas, berbasis keberagaman perlu melihat nilai dan situasi serta instrument yang ikut ambil bagian dalam menggagas hal tersebut. Diperlukan peran dan fungsi gereja dalam hal ini, GBKP yang memiliki nilai Calvin dan perjumpaan dengan situasi keberagaman di daerah Kabupaten Karo. Nilai-nilai pemberdayaan masyarakat yang beragam itu hendaknya tidak hanya terpusat pada internal, namun mengupayakan perwujudan nilai kemanusiaan itu dalam kekayaan keberagaman. Melalui pandangan Calvin terhadap kehadiran gereja dalam perubahan sosial, jelas memberi ruang kepada setiap manusia untuk terlibat dalam perdamaian dan penghapusan perbudakan yang menjadi tantangan relasi sosial. Yohanes Calvin memberikan gambaran bahwa orang percaya dan gereja sebagai komunitas, menunjukkan gambaran pemeliharaan dan

---

<sup>1</sup>GBKP adalah gereja beraliran protestan yang berbasis pada etnis yaitu Suku Karo. Berawal pada 18 April 1890 melalui lembaga penginjilan Belanda NZG (*Nederlandsche Zendeling Genootschap*) yang melakukan perintisan terhadap penyebaran Injil di wilayah Kabupaten Karo. Dimana penginjil pertama adalah H. C. Kruyt dari Tomohon dan selanjutnya ada empat orang penginjil lainnya yang melakukan penyebaran Injil. Sinode GBKP berpusat di daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hingga saat ini GBKP terus berkembang bukan hanya berpusat di daerah Sumatera Utara namun ke daerah-daerah di Indonesia untuk terus melakukan panggilan sebagai gereja dan pelayanan yang holistik ( Pdt. E. P. Gintings, *Sejarah Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)* (Medan:EL Penampat Gerafindo, 2015), 618.



kemurahan Allah melalui tindakan terhadap sesama manusia dalam menyatakan tindakan Allah dalam pemerintahan dunia.<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis-interpretatif, dimana menggunakan literatur kepustakaan sebagai sumber dan tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini mengangkat hipotesa bahwa, ide *Human Action* yang direpresentasikan Calvin dalam hidupnya merupakan nilai Gereja khususnya GBKP, untuk memberdayakan manusia terkhusus masyarakat Karo yang beragam dan bukan hanya jemaat GBKP. Melalui kegiatan berbasis swadaya bersama masyarakat yang mandiri sebagai nilai dasar dari *Civil Society*.

## **Pemikiran Calvin Terhadap *Social Change***

Yohanes Calvin melalui pemikirannya terkait erat dengan panggilan dan kehendak Allah yang didasari terhadap *Creates of God*. Penekanan akan kehendak Allah itu yang dibangun Calvin dalam landasan berpikir masyarakat yang jelas ditulis Calvin dalam pemahamannya, mengenai hubungan gereja dengan pemerintah dan masyarakat sosial. Pemikiran ini dipengaruhi oleh konteks Calvin di Jenewa pada abad-16, dimana pada masa itu masyarakat mengalami stratifikasi dan kelompok-kelompok terpinggirkan menjadi masalah sosial di kota Jenewa. Ditambah bagaimana pasifnya pemimpin gereja pada masa itu, maka Calvin mengungkapkan pandangan mengenai pembaharuan sosial yang berlandaskan kemanusiaan. Paham ini menegaskan bahwa orang yang terhina, diasingkan dan teralienasi dalam masyarakat sebenarnya adalah wajah Allah. Maka seharusnya respon terhadap sesama manusia sama dengan respon terhadap Allah, dan pemikirannya juga sampai pada keadilan sosial yang berbasis kesetaraan (*equality*) dalam menghadapi problema sosial khususnya kemiskinan dan tantangan dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Maka untuk mewujudkan pemikirannya Calvin membentuk pusat pelayanan sosial yang menekankan *hospitality* dan pemberdayaan terhadap masyarakat terhadap anak

---

<sup>2</sup> Yohanes Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*, ed. by Th. van den End (Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2008).

<sup>3</sup> Aliester. E. Mc. Grath, *A Life Of John Calvin: A Study In The Shaping Of Western Culture* (Oxford, UK: B. Blackwell, 1990), 111-113.



yatim-piatu, janda-janda, orang lumpuh, cacat dan yang lainnya agar mendapatkan pelayanan dengan serius yang bukan hanya sebagai penerima. Tetapi menekankan akan pemberdayaan ekonomi dan pembebasan yang berdimensi terhadap fungsi pemberdayaan manusia.<sup>4</sup> Jelas dalam kaitan ini Calvin mengangkat nilai-nilai pemeliharaan Allah dan kedaulatan-Nya (*Sovereignty Of God*), direspon manusia melalui perwujudan Allah yang berotoritas dalam kesetaraan dan pemberdayaan manusia.

Pandangan Calvin mengenai perubahan sosial sangat erat dengan budaya di Jenewa dan Eropa pada zaman awal modern pada masa itu. Terjadi perubahan sistem kesejahteraan kota dari bersifat tidak tersentralisasi yang dikelola oleh ordo *religious* (Gereja Roma Katolik), menjadi sistem sentralisasi yang dikendalikan oleh dewan kota. Perubahan ini didorong juga oleh Calvin karena melihat begitu menyimpangnya pengelolaan kesejahteraan, yang turut diatur dan diawasi oleh dewan kota yang ternyata secara independen membiayai para diaken dan pendeta. (Lih: *Bourse Francaise*<sup>5</sup>). Calvin sendiri mendorong pemerintahan kota madya Jenewa untuk memperhatikan dan melakukan pengaturan, serta pengembangan terhadap rumah sakit sekaligus panti asuhan. Lalu membatasi biaya pencetakan yang ternyata dipengaruhi oleh keuntungan atas gereja, kantor kesejahteraan, layanan umum, dan pengelolaan harga-harga agar stabil .

Menurut Calvin dalam Timothy D. Cerrel<sup>6</sup>, bahwa “manusia pada dasarnya makhluk sosial, dan melalui naluri alamiahnya cenderung mengembangkan dan memelihara masyarakat. Maka, dari itu akal budi manusia dapat membedakan mana yang baik dan jahat dan olehnya dia dapat memahami dan menilai” Terlihat makna perubahan sosial yang ditawarkan oleh Calvin mendorong kesadaran individu untuk secara kolektif, melihat perubahan sosial baik dari pemerintah madya, rakyat, dan perekonomian dapat membawa pengaruh besar dalam diri manusia. Maka diperlukan akal budi yang menaati prinsip-prinsip hukum dan alkitab terutama hukum Allah, untuk dapat menyadari bahwa relasi secara individu di masyarakat dapat memberikan pengaruh bagi jalannya pemerintahan dan perekonomian.

---

<sup>4</sup> John H. Leith, *John Calvin's Doctrine Doctrine Of The Christian Life* (Eugene: Wipf And Stock Publishers, 2010), 166-167.

<sup>5</sup> David W. Hall, *Warisan John Calvin* (Surabaya: Momentum, 2009), 16-17.

<sup>6</sup> Timothy D. Terrell, ‘Sumbangsih Calvin Pada Teori Dan Kebijakan Ekonomi’, in *Calvin Dan Kebudayaan: Menjelajahi Suatu Wawasan Dunia*, ed. by David W. Hall & Marvin Padgett (Surabaya: Momentum, 2017), 91-93.



Penekanan terhadap keadilan kolektif dan pengelolaan secara individu melalui akal budi menjadi nilai yang dibawa dalam perubahan sosial, meskipun secara kebijakan pemerintahan memberikan pengaruh yang kecil. Namun perubahan sosial membawa nilai secara individual yang saling menghargai, memahami penderitaan, dan usaha bersama dalam kesejahteraan menjadi nilai yang penting secara komunal.

### **Konsep *Civil Society* Dalam Kacamata Indonesia**

Berbagai pandangan serta teori mengenai konsep *Civil Society* sebagai nilai dari sosial politik, namun substansi yang diangkat dalam *civil society* adalah kemandirian dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Sejarah mengenai *civil society* ini merupakan sejarah panjang yang berasal dari masyarakat Barat, dari istilah *societas civilis* yang digunakan oleh Cicero (106-43 SM) dalam filsafat politiknya. Terus dipahami dan berkembang sebagai identitas yang sama dengan pengertian tentang negara, sampai pada abad-18 terjadi perubahan makna menjadi dua pemaknaan yang berbeda. Ini bersamaan dengan perubahan struktur politik Eropa yang berubah pada masa abad pencerahan dan modernisasi. Substansi kemandirian dan swadaya dalam ruang lingkup masyarakat dan publik yang coba diangkat, melalui konsep *civil society* ini dalam relasi-relasi sosial. Sebagai manusia dibutuhkan jaringan dan kekuatan bersama dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hal ini pembangunan berbasis kemanusiaan.

Dalam perkembangan *civil society* mengalami perbedaan pandangan dan rasa skeptisisme untuk diterapkan menjadi dasar Negara, namun ciri-ciri mendasar dari konsep inilah yang sebenarnya menjadi inti dalam pengembangan masyarakat. Indonesia sudah memiliki dasar-dasar itu dalam masyarakat, terbentuknya organisasi kemasyarakatan, politik, sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa secara independen nilai *civil society* ini sudah hidup dan menjadi dorongan dalam masyarakat untuk membahas isu-isu dalam konteks kelompok masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Masroer C Jb & Lalu Darmawan, 'WACANA CIVIL SOCIETY (MASYARKAT MADANI) DI INDONESIA', *Sosiologi Reflektif*, Vol 10, No (2016), 35–64, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/131496-ID-none.pdf>, 57.



Maka menurut Herry Priyono dalam Johannes B. Banawiratma<sup>8</sup> bahwa dalam ruang lingkup masyarakat secara umum, ada 3 akses yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Pertama adalah *community* sebagai wadah hubungan yang terjadi tanpa ada transaksi dan administratif, ini berkaitan dengan komunitas yang didasari pada sejarah, wilayah, etnis, agama dan bahasa. Lalu, kedua adalah wilayah *market* dimana terjadi wilayah transaksi, dan berbicara mengenai untung dan rugi sebagai efisiensi ekonomi. Ruang lingkup yang terakhir adalah pemerintah yang merujuk pada institusi publik, sebagai penentu kebijakan dan tindakan, serta memiliki kekuasaan melalui regulasi terhadap masyarakat dan terhadap *market*.

Ketiga kekuatan dalam kehidupan masyarakat ini merupakan hal potensial untuk bertemu pada *public domain=life sharing*, dimana area sosial kehidupan antar masyarakat untuk bersama membangun masyarakat. Area ini menjadi relasi baik antar agama-masyarakat maupun institusi dalam melihat kenyataan sosial yang terjadi. Ini menandakan bahwa dalam ruang-ruang sosial di Indonesia tetap memiliki pengaruh kuat melalui pemerintah, yang menetapkan kebijakan dalam mengatur komunitas masyarakat dan juga ekonomi. Melalui kacamata Indonesia yang beragam, perlunya kekuatan dalam komunitas masyarakat untuk membangun komunitas itu sendiri dan tidak hanya bergantung pada kebijakan-kebijakan itu.

Hal ini menekankan bahwa melalui kekuatan sosial dan relasi antar masyarakat yang berjumpa pada ruang publik, dan juga aksi dari masyarakat itu sendiri memberi pengaruh baik terhadap pemerintah ataupun pasar. Potensi dan perbedaan adalah suatu hal yang sejalan dalam melihat *civil society* melalui kacamata Indonesia. Perlunya gerakan kebersamaan dan saling berbagi dalam keprihatinan, serta rasa membangun masyarakat berbasis kemanusiaan di ruang sosial merupakan kesadaran bersama yang harus di bangun. Melihat dari kacamata Indonesia berarti juga melihat kacamata *diversity*, yang memiliki nilai dari komunitas suku, agama, dan etnis yang berbeda. Melalui perbedaan ini saling berbagi nilai dan pengalaman akan membawa perubahan pada ruang sosial untuk melihat pembangunan berbasis kemanusiaan yang lebih memanusiakan manusia. Permasalahan keadilan, kemanusiaan, gender, hak asasi manusia, kemiskinan, ekologi, dan berbagai

---

<sup>8</sup> Johannes B. Banawiratma, 'Power and Interreligious Relations: An Example from Indonesia', in *Religion, Civil Society and Conflict on Indonesia*, ed. by Frans Wijzen Carl Sterkens, Muhammad Machasin (Germany: Deutsche Nationalbibliothek, 2009), 102-104.



permasalahan sosial, yang sama-sama dihadapi Indonesia merupakan kacamata bersama yang harus dilihat dan disadari. Melalui ini maka kacamata komunitas dipakai untuk saling berbagi dan membangun dalam kebersamaan.

### **GBKP Dalam Realita Sosial: Sebuah Analisa-Deskriptif**

Realita GBKP adalah realita budaya Karo yang erat dengan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam struktur kekerabatan budaya Karo yang dinamakan *Rakut Si Telu* (*kalimbubu, senina/sembuyak dan anak beru*) dan *Marga Si Lima* (*Ginting, Karo-Karo, Perangin-angin, Sembiring, Tarigan*). Hal ini merupakan identitas yang melekat dalam hubungan satu-sama lain dalam budaya Karo. *Rakut Si Telu* memiliki peran dalam hubungan dinamika status atau derajat tinggi dan rendah dalam adat Karo dalam acara-acara adat maupun kehidupan sehari-hari, sedangkan *Marga Si Lima* adalah identitas marga yang disandang individu dari garis keturunan Ayah. Inilah yang menjadi identitas keterhubungan satu-sama lain meskipun identitas agama berbeda, sehingga hubungan ini menjadi fondasi dasar melihat realitas masyarakat Karo. Masyarakat Karo pada umumnya sebagai masyarakat yang bermukim di daerah dataran tinggi, memiliki profesi sebagai petani dan pedagang. Namun, secara umum profesi masyarakat Karo, khususnya di daerah Kabupaten Karo sudah bersifat heterogen. Melalui hal ini masyarakat Karo memiliki tantangan yang beragam dan lebih variatif, bukan hanya mengalami permasalahan-permasalahan sosial pada sektor tertentu,<sup>9</sup>

*Realita* sebagai gereja adalah realita yang menjawab tantangan dan pergumulan, maka GBKP yang hidup di tengah-tengah pergumulan jemaat juga menghadapi realitas pengaruh globalisasi, baik dari sektor ekonomi, sosial, budaya, bahkan identitas GBKP itu sendiri. Turut menjadi perhatian dalam era globalisasi dan informasi saat ini, muncul perubahan-perubahan yang terjadi yang menimbulkan dampak positif maupun negatif. Namun, saat ini terfokus pada realita di sekitar gereja, yaitu masalah HAM dan gender, keadilan, perdamaian, lingkungan hidup, dan berbagai masalah serta fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini muncul di ruang publik.

---

<sup>9</sup> M. Abduh Lubis, 'Budaya Dan Solidaritas Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo', dalam *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 2018, pp. 239–58, diakses pada <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/112-06/1192>, 253-255.



Dalam realitas GBKP masalah-masalah ini muncul beriringan dengan masalah-masalah pertanian, ekonomi, intoleransi beragama, dan beragam persoalan internal GBKP. Dalam kaitan dengan kenyataan GBKP membangun relasi untuk mampu merespon dan memberikan jawaban-jawaban atas persoalan yang terjadi, merupakan sebuah tantangan bagaimana nilai-nilai keagamaan itu dibawa ke ranah sosial untuk menjawab pergumulan yang ada. Maka menarik, untuk melihat peran GBKP dalam membangun kerjasama baik terhadap komunitas agama, sosial, dan pemerintah untuk berpartisipasi dalam permasalahan yang ada di sekitar gereja.

Perjumpaan GBKP dalam budaya Karo merupakan perjumpaan yang saling melengkapi dan memberikan nilai-nilai untuk perkembangan baik dalam gereja, maupun berdampak pada masyarakat Karo sendiri. Perjumpaan itu kini menghadapi realita-realita bersama dalam masyarakat dan ruang sosial, GBKP melakukan peran-peran dalam intervensinya untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan masyarakat. Melalui visi-misi gereja dan program-program yang sudah dicanangkan, seperti program peningkatan solidaritas antar sesama dan juga peran gereja dalam relasi antar umat beragama. Namun pada kenyataannya, relasi ini membutuhkan jawaban dalam masyarakat Karo yang menghadapi krisis ekonomi, bahan-bahan pertanian, dan berbagai masalah lainnya.<sup>10</sup>

Hubungan dengan *civil society*, maka perlunya implementasi yang nyata di tengah realitas pergumulan GBKP itu sendiri. Dimana bukan hanya berfokus pada solidaritas dan diakonia yang internal, namun membuka peluang dalam diakonia transformatif dan solidaritas eksternal. Tantangan wacana-wacana ini hanya sampai sampai pada diskusi tertulis, namun pada kaitan program, tindakan, dan evaluatif bersama masih kurang dilakukan secara universal. Setiap agama, kelompok masyarakat, dan pemerintah merupakan satu-kesatuan yang saling berhubungan. GBKP harus melihat itu lebih pada keterbukaan dan nilai bersama kemanusiaan, untuk membuka wacana dialog nilai dan interpretasi nilai yang lebih aktual.

Persoalan di sekitar GBKP juga tidak pernah lepas dari klaim kebenaran dan *ghetto* dalam diri, sehingga sulit jika memiliki apriori untuk membangun klaim kebenaran secara

---

<sup>10</sup> Waston Malau, Dan William, and Chandra Ginting, 'Peranan Gereja Batak Karo Protestan Dalam Mempertahankan Dan Melestarikan Budaya Etnis Karo Di Kabanjahe', dalam *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 2.2 (2016), 130–143, diakses pada <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos/article/view/5282>, 139-140.





bersama dalam rangka pemberdayaan. GBKP sudah mencoba membangun nilai-nilai kebersamaan itu dalam unit DAI (Dialog Antar Iman) GBKP, namun hal ini belum menjawab tantangan bersama itu bukan hanya dipercakapkan, namun menjawab atas tantangan itu. Maka, menurut Banawiratma dalam Penrad<sup>11</sup>, “bahwa perlu dalam dialog kebersamaan sampai pada tahapan dialog aksi”. Melalui tahapan ini, perlu terlebih dahulu adanya perjumpaan terhadap komunitas baik lintas iman ataupun lembaga masyarakat yang independen, untuk saling berbagi pengalaman dan tradisi masing-masing dalam memandang tantangan-tantangan yang ada dalam masyarakat. Melalui berbagi pengalaman dan kekayaan perspektif, maka disinilah diperlukan untuk mengolah konteks bersama berbasis kemanusiaan.

Penekanan terhadap peran GBKP, tidak hanya sampai pada tahapan dialog-pasif, namun pada tahap wadah pengajaran, praksis, dan tidak melupakan hakikat kebersamaan terhadap komunitas ataupun manusia lainnya. Dari kesadaran yang mulai terbangun, maka realitas GBKP, seperti kenaikan pupuk, harga produksi yang tidak stabil, intoleransi di ruang publik, politik identitas dan etnis menjelang pilkada/ pilpres, dan berbagai masalah lain harus terbuka untuk dibahas secara seksama. Relasi GBKP dan *civil society* yang mandiri ini merupakan hubungan yang erat dan menjunjung nilai kemanusiaan, dan harus memiliki dorongan serta fasilitasi antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan agar tidak hanya bergantung terhadap pemerintah, dan dilakukan dalam ranah lebih nyata dan reflektif melalui swadaya kemanusiaan.

### **Relevansi *Civil Society* dan Ide “*Human Action*” Calvin**

Konsepsi *civil society* erat kaitan dengan konsep masyarakat madani yang dianut oleh agama Islam. Namun, pada dasarnya konsep ini belum memiliki konsep mutlak yang dijadikan dalam konsep negara atau masyarakat. Jikalau dilihat dalam konsep pemikirannya, saya tertarik untuk melihat etos sebagai sebuah masyarakat dan manusia yang tidak tergantung terhadap kebijakan ataupun tindakan pemerintah. Namun membangun komunitas itu sendiri berdasarkan swadaya bersama dan tindakan kemandirian yang kreatif. Tidak dipungkiri ini merupakan konsep yang dekat dengan

---

<sup>11</sup> Pdt. Penrad Siagian, ‘Solidaritas Eksternal GBKP Di Tengah Konteks Pluralisme Agama Dan Kepercayaan’, in *Aku Kap Kam, Kam Kap Aku: Tahun Solidaritas Internal GBKP*, ed. by Ita Apulina Tarigan & Pdt. Pranata Jaya Manik (Kabanjahe: Abdi Karya, 2013), 212.



dengan Islam, namun konsep barat juga mengakui ini sebuah konsep yang dekat dengan liberal, independen, dan mensakralkan hakikat manusia. Maka, hal yang menarik untuk ditawarkan adalah pemberdayaan berbasis swadaya masyarakat yang beragam dan majemuk.<sup>12</sup>

Ide *human action* ini dilandasi dengan pemahaman Calvin bahwa semua ciptaan berada di bawah kedaulatan Allah, maka tidak ditata secara hierarkis namun menurut bidang atau vokasi sehingga dapat ditata untuk hidup secara berdampingan dalam kerjasama. Juga dengan ketaatan sukarela dan bebas sebagai ciptaan-Nya. Hal ini membawa pemahaman nilai kolektif dalam menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan mengelola sesuai kemampuan individu ataupun secara lembaga. Peran manusia adalah “panggilan” menurut Calvin, dimana melakukan pekerjaan secara holistik serta menyadari bahwa Allah mengamanatkan hal tersebut dan melakukan hal tersebut untuk Allah.<sup>13</sup>

Memahami pemahaman Calvin terkait dengan *human action* dan berkaitan dengan diakonia dalam tubuh gereja. Landasan diakonia sebagai tugas gereja dalam masa kini di tengah keberagaman, perlu memahami pelayanan secara holistik dan merangkul partisipasi semua pihak. Jelas, bukan dalam kepentingan internal gereja, maka Calvin memahami bahwa *diakonos* bukan hanya terlibat dalam penyelenggaraan ibadah dan membantu jalannya peribadahan. Namun, dalam hal ini mampu memiliki perhatian terhadap orang miskin dalam gereja maupun di tengah dunia.<sup>14</sup> Solidaritas, pemberdayaan masyarakat kecil, dan advokasi adalah bagian penting peran gereja. Dimensi sosial dalam Calvin melalui *human action* adalah peran dari manusia yang memiliki akal budi dan merupakan makhluk sosial untuk menjadi pengasuh dan pemelihara kehidupan bagi dirinya sendiri dan sesama. Hal ini memberi dimensi sosial dalam komunitas, dimana setiap individu ingin diterima lama keberadaan dan perbedaannya. Inilah yang menjadi dasar dalam membangun solidaritas, dan pemberdayaan berbasis kemanusiaan dalam pandangan Calvin.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Bernard Adeney-Risakotta, ‘Civil Society Dan Abrahamic Religions’, dalam *Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW*, Vol/ 32 No (2008), 260-263.

<sup>13</sup> Paul Marshall, ‘Calvin, Politik, Dan Ilmu Politik’, in *Calvin Dan Kebudayaan: Menjelajahi Suatu Wawasan Dunia*, ed. by David W. Hall & Marvin Padgett (Surabaya: Momentum, 2017), 176-177.

<sup>14</sup> Josef Purnama Widyatmadja, ‘Praxis Dan Refleksi Diakonia Transformatif Di Tengah Pergumulan Gereja Dan Masyarakat’, in *Calvinis Aktual*, ed. by Budiman Heryanto & Tim Kompilasi KPT GKI SW Jawa Barat (Jakarta: KPT GKI SW Jawa Barat, 2010), 194-195.

<sup>15</sup> Stella Yessy Exlentya Pattipelohy, ‘Calvin Dan Spiritualitas Kerahiman’, dalam *Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW*, Vol. 2 No (2017), 127–50, 136.



Kaitan dengan peran dan pemahaman Calvin, maka perlunya diakonia transformatif dilaksanakan bersinergi baik memberdayakan masyarakat melalui potensi yang ada, melakukan advokasi melalui badan hukum gereja atau lainnya untuk melihat kasus ketidakadilan sosial, serta menyadari peran ekologis dalam hubungan dengan LSM ataupun organisasi lingkungan lainnya dalam berperan membangun lingkungan yang ramah. Maka, peran-peran ini berkaitan dengan transformasi sosial yang menjadi perjalanan gereja dalam merangkul *civil society* untuk mengatasi pergumulan bersama secara mandiri, berdaya, dan *sustainable*. Ini menggambarkan ada peran yang sejajar dalam gerak bersama antara masyarakat, lembaga masyarakat mandiri, dan gereja (diakonia, pastoral sosial), dalam mengamati, menganalisa, merumuskan, dan menjalankan berbagai tindakan bersama. Bukan hanya untuk umat, namun melihat masyarakat yang mengalami penderitaan dan ketidakadilan. Seharusnya, bukan tindakan pasif namun tindakan reflektif-aktif dalam menghidupkan nilai transformasi sosial yang beragam, dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan.

Menyadari hal sebagai manusia yang berada pada kedaulatan dan tuntunan Allah, menjadi sarana gereja khususnya GBKP dalam memaksimalkan potensi relasi dan pemberdayaan bersama berbasis keberagaman. Banyak pekerjaan dan lembaga-lembaga lain sebagai satu kesatuan yang holistik, untuk mengatasi tantangan kemanusiaan masa kini. Relasi itu hendaknya bukan hanya sekedar wacana dialog, namun sampai kepada praksis dalam mengatasi ataupun mengelola tantangan itu. Melalui hakikat panggilan sebagai ciptaan, gereja tidak bisa sendiri mengatasi tantangan itu, perlu adanya sinergitas baik terhadap ranah *civil society* dalam pemberdayaan dan pengelolaan, maupun dalam ranah pemerintahan untuk terus menyuarakan keadilan dan bekerjasama dalam memberikan ide solutif untuk kebijakan bersama yang lebih baik.

GBKP sebagai gereja kesukuan melihat peluang dalam pemberdayaan masyarakat secara komunal. Ide Calvin yang diaplikasikan dalam *human action* sebagai ciptaan Allah dan ide *civil society*. Keterkaitan budaya menjadi jembatan dalam membangun peradaban manusia, dimana dapat saling merasakan perjuangan dan penderitaan yang sama, bagaimana melihat pergumulan menjadi tantangan bersama, dan mentransformasi pola pikir yang cenderung dangkal dalam melihat sesama yang berbeda. Dalam melihat pergumulan dalam internal maupun eksternal, seperti pengentasan kemiskinan, perbedaan



pemahaman dalam bergereja, sifat apatis, dan permasalahan lainnya dapat dilihat dan disadari sebagai pergumulan internal dan eksternal.

Maka perubahan pola pikir dapat terbentuk melalui kebersamaan, dalam menyadari pergumulan yang harus dijawab, untuk mempertahankan eksistensi sebagai manusia. Melalui pendekatan kebudayaan yang hidup di sekitar GBKP, sudah seharusnya jalinan kekerabatan baik dalam identitas yang berbeda bukan hanya sebagai konsep teori, namun diberdayakan dalam rangka meningkatkan nilai kesejahteraan, keamanan, bahkan keberimanan.<sup>16</sup>

### **GBKP: Dipanggil Keluar Dari “Ghetto” Menuju Pemberdayaan Manusia**

Dalam memaknai panggilan kemanusiaan adalah bagaimana melihat makna penciptaan Allah terhadap manusia dalam karya *image of God*. Maka dalam konstruksi berpikir dan aksi dalam relasi antar manusia, menjadi tujuan melihat penderitaan dan pergumulan yang sama sebagai sesama manusia. Hal ini dapat dikaitkan dengan penerimaan akan *dignity of life* dan konstruksi berpikir akan kebebasan sebagai umat Allah dipahami sebagai refleksi dalam tindakan kemasyarakatan. Membangun relasi untuk keluar dari batasan-batasan dogmatis, perlu menyadari identitas dan peran panggilan pribadi.<sup>17</sup> Ruang lingkup *civil society* di Indonesia secara nyata belum terkonstruksi, namun dalam nilai-nilai keberagaman, keadilan, dan peran dalam masyarakat itu, sudah terwujud dalam pengamalan nilai-nilai pancasila. Maka, memahami peran perlu disadari pada hakikat kemanusiaan tanpa batasan agama, suku, dan ras. Keluar dari “ghetto” dalam konteks masalah ini adalah keluar dari pergumulan bersama, masuk pada konsep relasi bersama melalui membuka batasan yang ada dalam praktik hidup sesama manusia.

Pemikiran tentang dialog, lokakarya, ataupun diskusi dogmatis dalam agama-agama, sudah harus menunjukkan nilai *human action*, karena dalam penderitaan dan mewujudkan nilai kemanusiaan. Memahami *sesamaku manusia* terasa nyata dan mendewasakan pemikiran, serta peka terhadap pergumulan sekitar gereja, pemikiran, kepentingan komunitas, atau bahkan keuntungan ekonomi pribadi merupakan tantangan

---

<sup>16</sup> Paulus S. Widjaja, ‘Tantangan Dan Prospek Relasi Antarumat Beragama’, in *Meretas Diri, Merengkuh Liyan, Berbagi Kehidupan*, ed. by Paulus S. Widjaja & Wahyu S. WIBowo (Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2020), 346-348.

<sup>17</sup> Veli-Matti Karkkainen, *Creation And Humanity* (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2015), 284-289.



keberagaman agama saat ini.. Ide *human action* yang ditawarkan Calvin dengan relevansi terhadap nilai *civil society* harus direpresentasikan dalam aksi bersama. Meskipun banyak yang sudah aktif melakukan dalam bentuk bantuan-bantuan sosial, pengelolaan sumber daya manusia, dan rancangan-rancangan dialog lintas agama. Namun, hal itu merupakan proses dan perjalanan panjang Kekristenan dalam pergumulan menghadapi isu-isu kemanusiaan. Maka, sudut pandang bersama berupaya untuk membangun dialog-konstruktif, lalu implementasi melalui pemberdayaan potensi dalam masyarakat. Konsep-konsep praktis merupakan perwujudan dari ide-ide bersama yang dapat juga dirasakan bersama, maka dampak dari kehadiran umat beragama adalah dampak praktis yang tidak berhenti pada konsep teoritis bersama.

GBKP yang hidup di tengah masyarakat Karo diharapkan mampu menghadirkan advokasi dalam isu kemanusiaan, menghadirkan keadilan, kebenaran serta pembebasan dan kesetaraan bagi setiap umat manusia. “Dipanggil keluar” adalah dimana membebaskan nilai-nilai dogmatis yang hanya sebatas teori, namun hadir di tengah-tengah penderitaan manusia. Dalam kaitan umat Allah yang terpanggil dengan komunitas gereja, maka yang diutamakan bagaimana hakikat Kekristenan tanpa *ghetto* adalah solusi bagi hadirnya Kristus dalam dunia. Terlepas dari identitas suku, agama, dan budaya terlihat batasan itu hanyalah formalitas belaka, karena atas nama kemanusiaan dan perdamaian maka landasan kemanusiaan menjadi menjadi tahapan dalam perkembangan masyarakat yang berbasis *civil society*<sup>18</sup>

Pentingnya juga gereja membangun kesadaran terhadap umat-Nya dalam pendidikan berbasis Kekristenan yang menekankan keberagaman dan nilai harmonis dalam mewujudkan relasi keberagaman. Melalui pendidikan secara internal dalam jemaat baik dalam pembinaan, bahan khotbah, bahan renungan, dan aksi-aksi bersama dalam masyarakat. Hal ini menjadi alat bagi gereja untuk membangun nilai fundamental, melalui saling menghargai nilai kebersamaan dan memupuk rasa swadaya atas permasalahan-permasalahan bersama. Pentingnya pengajaran dan edukasi dari pemimpin gereja berperan dalam membangun *civil society*. Melalui pendidikan Kristen baik dalam gereja maupun dalam kehidupan sehari-hari harus membangun pemahaman untuk belajar dari yang lain, baik suku, agama, dan ras yang berbeda, sehingga menjadi suatu usaha untuk merangkul

---

<sup>18</sup> Ebenhaizer I. Nuban Timo, *Meng-Hari-Ini-Kan Injil DI Bumi Pancasila* (Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2017), 464-469.



orang-orang di luar gereja membangun dialog dan komunitas bersama<sup>19</sup>. Hal ini sejalan dengan visi *Syalom* untuk semua ciptaan Allah yang berjuang untuk perdamaian dan keadilan.

Melalui dasar pengajaran di gereja, membawa relasi keluar dari batasan-batasan sempit di pemikiran, dan mulai membangun relasi-relasi bersama atas nama kemanusiaan untuk melihat realitas sosial. GBKP sebagai gereja suku memainkan peran penting dan memiliki nilai kebersamaan, atas dasar suku tersebut untuk membangun relasi yang bukan hanya sekedar dialog dan wacana. Hal ini harus terwujud dalam melihat konteks kemiskinan, bencana, penyediaan lapangan pekerjaan, judi-narkoba-HIV/AIDS, dan permasalahan lainnya untuk dibicarakan dalam tataran analisa-solutif. Menyuarakan, mewadahi, memfasilitasi, mengedukasi, dan berbagai aksi yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas bersama dalam menghadapi persoalan tersebut.

*Civil society* yang mengutamakan gerakan praksis dan kemandirian, menjadi landasan dasar untuk memahami pergerakan masyarakat juga merupakan pergerakan gereja. Dalam hal ini menyoroti pergerakan masyarakat dalam bidang kritik-sosial melalui LSM dan komunitas sosial lainnya, namun gereja dari sisi yang lain bergerak dalam praksis untuk membangun asas-asas kemanusiaan dalam perannya di tengah komunitas bersama. Konsep secara teologis adalah hasil refleksi yang harus disuarakan, dalam pembangunan yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Seturut juga dengan pembangunan masyarakat sipil (*civil society*) menjadi lebih berdaya dan tangguh. Jelas bahwa tanggung jawab kemanusiaan dan pemberdayaan memiliki hubungan antara gereja, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk membangun pemberdayaan yang efektif.<sup>20</sup>

Menurut pandangan tokoh studi poskolonialisme, Gayatri Spivak bahwa pola berpikir mengenai konsep solidaritas, bukan menyerang atau mengkritik sistem terhadap ketimpangan sosial ataupun praktik-praktik ketidakadilan. Namun, problem-problem dalam kemasyarakatan yang berkaitan dengan relasi manusia dapat terhenti ketika menyadari berharganya hak hidup sesama manusia. Maka kehidupan solidaritas yang

---

<sup>19</sup> Kees De Jong, 'Religious (Peace) Education as a Mean to Avert Threats to Religious Harmony In Indonesia', in *Religion, Civil Society and Conflict on Indonesia*, ed. by Frans Wijzen Carl Sterkens, Muhammad Machasin (Germany: Deutsche Nationalbibliothek, 2009), 163-167.

<sup>20</sup> Handi Hadiwitanto, 'Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Komunal Atas Masalah Kemanusiaan (Tinjauan Teologi Politik-Kontekstual Dalam Konteks Indonesia)', dalam *Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW*, 32 No.2 (2008), 187-188.



universal, memberi pengaruh atas eksploitasi dan diskriminasi yang terjadi atas masalah kemanusiaan. Semangat kebersamaan itu mengakui bentuk perbedaan dalam relasi kemanusiaan, dan mengurangi nilai keakuan baik secara individu maupun komunal. GBKP bersama *civil society* hadir menjadi representasi dalam kelompok-kelompok masyarakat agar memiliki kesadaran, dalam memperjuangkan hak-hak secara individu dan mengelola sumberdaya yang ada sebagai sebuah potensi dalam masyarakat.<sup>21</sup>

## **KESIMPULAN**

GBKP sebagai gereja yang hidup di tengah masyarakat Karo, menghadapi tantangan-tantangan kemanusiaan yang menjadi perjalanan sebagai sebuah gereja. Upaya mengejawantahkan semangat Calvin dalam *human action* menjadi dorongan yang kontekstual melihat tantangan kemanusiaan, globalisasi, ekologi, dan masalah budaya. Isu-isu sosial yang disuarakan oleh gereja merupakan kesadaran bahwa gereja turut andil dalam *social empowerment*, dan bukan hanya berpusat pada praksis-dogmatis dalam gereja. Gerakan gereja turut memberi alternatif yang tepat bagi masyarakat dalam menjawab pergumulan sosial yang dihadapi, serta perannya juga dalam menyuarakan terhadap pemerintah dalam rangka memperhatikan fenomena sosial terkait persamaan hak, keadilan sosial, dan hak-hak kemanusiaan. Dampak modernitas juga kini dihadapi oleh gereja yang dimana perannya bukan hanya sekedar menyuarakan, namun ikut ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan untuk membekali masyarakat mengatasi fenomena dan permasalahan yang ada. Agama dan khususnya gereja melihat penanggulangan permasalahan yang nyata, penting untuk dibangun dalam tahap edukasi, pemandirian, dan pelatihan praktis. Maka peran itu dirasakan nyata melalui kehadiran gereja dalam masyarakat. Serta sejauh mana agama mampu untuk menjadi jembatan antara *civil society* dan pemerintahan, untuk melihat hal-hal yang perlu dikritisi dan melihat jalinan kerjasama untuk mengatasi permasalahan yang nyata. Maka, *civil society* menekankan akan kemandirian dan swadaya, serta gereja hadir sebagai fasilitator dan penghubung dalam hal permasalahan *grass-roots*. Terkadang tidak diperhatikan oleh pemerintah namun dialami gereja sebagai komunitas iman dalam sehari-hari.

---

<sup>21</sup> Angelly Christisya Kantohe, “Solidaritas Yesus Terhadap Kaum Miskin: Studi Hermeneutik Lukas 21:1-4 Dengan Perspektif Subaltern Gayatri Spivak,” dalam *Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW* Vol 6 No. (2021): 249–63, 262.



Maka pemberdayaan berbasis kemanusiaan harus diedukasi melalui pengajaran, tindakan kerjasama yang bukan hanya sekedar dialog, dan menjadi nilai diakonia transformatif GBKP ke depannya. Membangun kesadaran bersama dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, swadaya masyarakat, dan lembaga independen lainnya menjadi suatu keharusan. Serta, melihat GBKP juga mampu untuk memberi *suara kenabian* terhadap pemerintah dalam perannya memberi advokasi, wacana, dan pembinaan-pembinaan. Pelayanan terpadu dengan memberdayakan *civil society*, untuk melihat masalah bersama adalah jawaban dalam membangun bingkai-bingkai aksi bersama dalam nilai-nilai kemanusiaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adeney-Risakotta, Bernard. "Civil Society Dan Abrahamic Religions." *Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW* Vol 32 No. (2008).
- Banawiratma, Johannes B. "Power and Interreligious Relations: An Example from Indonesia." In *Religion, Civil Society and Conflict on Indonesia*, edited by Frans Wijzen Carl Sterkens, Muhammad Machasin. Germany: Deutsche Nationalbibliothek, 2009.
- Calvin, Yohanes. *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*. Edited by Th. van den End. Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2000.
- Grath, Aliester. E. Mc. *A Life Of John Calvin: A Study In The Shaping Of Western Culture*. Oxford, UK: B. Blackwell, 1990.
- Hadiwitanto, Handi. "Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Komunal Atas Masalah Kemanusiaan (Tinjauan Teologi Politik-Kontekstual Dalam Konteks Indonesia)." *Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW* 32 No.2 (2008).
- Hall, David W. *Warisan John Calvin*. Surabaya: Momentum, 2009.
- Jong, Kees De. "Religious (Peace) Education as a Mean to Avert Threats to Religious Harmony In Indonesia." In *Religion, Civil Society and Conflict on Indonesia*, edited by Frans Wijzen Carl Sterkens, Muhammad Machasin. Germany: Deutsche Nationalbibliothek, 2009.
- Kantohe, Angelly Christisya. "Solidaritas Yesus Terhadap Kaum Miskin: Studi Hermeneutik Lukas 21:1-4 Dengan Perspektif Subaltern Gayatri Spivak." *Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW* Vol 6 No. (2021): 249–63.
- Karkkainen, Veli-Matti. *Creation And Humanity*. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2015.





- Leith, John H. *John Calvin's Doctrine Doctrine Of The Christian Life*. Eugene: Wipf And Stock Publishers, 2010.
- Lubis, M. Abduh. "BUDAYA DAN SOLIDARITAS SOSIAL DALAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN KABANJAHE KABUPATEN TANAH KARO." *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 2018. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/112-06/1192>.
- Malau, Waston, Dan William, and Chandra Ginting. "Peranan Gereja Batak Karo Protestan Dalam Mempertahankan Dan Melestarikan Budaya Etnis Karo Di Kabanjahe." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 2, no. 2 (December 10, 2016): 130–43. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos/article/view/5282>.
- Marshall, Paul. "Calvin, Politik, Dan Ilmu Politik." In *Calvin Dan Kebudayaan: Menjelajahi Suatu Wawasan Dunia*, edited by David W. Hall & Marvin Padgett. Surabaya: Momentum, 2017.
- Masroer C Jb & Lalu Darmawan. "WACANA CIVIL SOCIETY (MASYARKAT MADANI) DI INDONESIA." *Sosiologi Reflektif* Vol 10, No (2016): 35–64. <https://media.neliti.com/media/publications/131496-ID-none.pdf>.
- Pdt. E. P. Gintings. *Sejarah Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)*. EL Penampat Gerafind, 2015.
- Pdt. Penrad Siagian. "Solidaritas Eksternal GBKP Di Tengah Konteks Pluralisme Agama Dan Kepercayaan." In *Aku Kap Kam, Kam Kap Aku: Tahun Solidaritas Internal GBKP*, edited by Ita Apulina Tarigan & Pdt. Pranata Jaya Manik. Kabanjahe: Abdi Karya, 2023.
- Stella Yessy Exlentya Pattipelohy. "Calvin Dan Spiritualitas Kerahiman." *Gema Teologika: Jurnal Fakultas Theologia UKDW* Vol. 2 No (2017): 127–50.
- Terrell, Timothy D. "Sumabngsih Calvin Pada Teori Dan Kebijakan Ekonomi." In *Calvin Dan Kebudayaan: Menjelajahi Suatu Wawasan Dunia*, edited by David W. Hall & Marvin Padgett. Surabaya: Momentum, 2017.
- Timo, Ebenhaizer I. Nuban. *Meng-Hari-Ini-Kan Injil DI Bumi Pancasila*. Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2017.
- Widjaja, Paulus S. "Tantangan Dan Prospek Relasi Antarumat Beragama." In *Meretas Diri, Merengkuh Liyan, Berbagi Kehidupan*, edited by Paulus S. Widjaja & Wahyu S. Wibowo. Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 2020.
- Widyatmadja, Josef Purnama. "Praxis Dan Refleksi Diakonia Transformatif Di Tengah Pergumulan Gereja Dan Masyarakat." In *Calvinis Aktual*, edited by Budiman Heryanto & Tim Kompilasi KPT GKI SW Jawa Barat. Jakarta: KPT GKI SW Jawa Barat, 2010.